I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaku tindak pidana pada saat ini tidak lagi terbatas pada orang-orang dewasa tetapi sudah merambah hingga anak-anak di bawah umur. Terkait dengan tindak pidana yang dilakukan anak-anak di bawah umur, semua sepakat bahwa pelakunya tetap harus diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, sesuai dengan asas *equality before the law*, namun jika melihat pada kerangka perlindungan anak tentunya tidak bijaksana apabila perlakuan pada anak di bawah umur sama dengan perlakuan terhadap orang dewasa karena secara fisik dan psikis, kondisi anak-anak masih labil dibandingkan orang dewasa.¹

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Anak dalam konstitusi Indonesia, memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.² Kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara

¹ Wagiarti Soetodjo. *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), Hlm. 12

² Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Republik Indonesia Tahun 1945 perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi anak.³

Prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara, namun dalam pelaksanaannya anak diposisikan sebagai obyek dan perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum cenderung merugikan anak.⁴

Pemerintah dalam rangka perlindungan hukum terhadap anak sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penyusunan Undang-Undang ini merupakan penggantian terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang dilakukan dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa.⁵

³ Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁴ *Ibid*

⁵ *Ibid*

Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak salah satunya didasari karena akhir-akhir ini sering terjadi pemberitaan di media mengenai perkelahian anak yang berujung ke meja sidang atas dakwaan tindak pidana penganiayaan ringan, kepolisian sebagai institusi pertama dalam sistem peradilan pidana Indonesia seharusnya dapat menggunakan kewenangan diskresinya. Diskresi kepolisian dapat juga digunakan dalam tindak pidana ringan, karena tindak pidana ringan sebenarnya dapat diselesaikan tanpa adanya proses peradilan.

Penerapan diskresi kepolisian dalam penegakan hukum pidana terhadap anak, dipengaruhi faktor usia pelaku yang masih di bawah umur. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menyatakan anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah. Faktor yang mempengaruhi penerapan diskresi terhadap anak dalam perkembangannya semakin meluas, seperti dipengaruhi oleh berat ringannya kejahatan, penyebab terjadinya kejahatan, jumlah kerugian yang diderita korban, atau kehendak dari korban sendiri karena korban merasa apa yang dituntutnya telah dipenuhi oleh pelaku misalnya pelaku telah membayar ganti kerugian atau kompensasi atau pelaku telah menyampaikan permintaan maaf, apabila kasusnya adalah pencemaran nama baik.⁶

⁶ http://elisatris.wordpress.com/penerapan-diskresi-kepolisian-dalam_penegakan-hukum-hukum-pidana/, diakses tanggal 20 Maret 2013 pukul 11.30 WIB

Tindak pidana penganiayaan yang dilakukan antara sesama anak pada saat ini sering kali terjadi, bentuknya dapat berupa perkelahian. Tidak jarang perkelahian ini mengakibatkan luka-luka baik bagi korban maupun pelakunya sendiri. Penganiayaan sendiri diatur dalam Pasal 351 KUHP yang menjelaskan bahwa pelaku penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan.⁷ Apabila suatu penganiayaan mengakibatkan luka berat, maka berdasarkan Pasal 351 ayat (2) KUHP maksimum hukuman dijadikan 5 (lima) tahun penjara, sedangkan jika berakibat matinya orang hukumannya meningkat lagi menjadi 7 (tujuh) tahun penjara.⁸ Penganiayaan yang dilakukan oleh anak yang terkategori penganiayaan ringan sebenarnya dapat diterapkan diskresi di tingkat kepolisian, sehingga proses hukumnya tidak sampai di tingkat pengadilan.

Penggunaan diskresi kepolisian memang harus dilakukan secara tepat terhadap tindak pidana yang terjadi di masyarakat. Tindakan diskresi atas tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak oleh Kepolisian Resor Kota (Polresta) Bandar Lampung salah satunya adalah perkara Nomor LPB/04/I/2012/LPG tanggal 1 Januari 2012 dengan nama pelapor, yaitu Lia dan Dina. Kedua pelapor ini saling melaporkan dengan tuduhan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 KUHP jo Pasal 80 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. (Bandung: Refika Aditama, 2010), Hlm. 68

⁸ Wirjono Prodjodikoro, *op. cit.* Hlm. 69

Kejadian ini bermula terjadi kesalahpahaman antara Lia dan Dina. Perkelahian antara Lia dan Dina dipicu karena kecemburuan Dina terhadap Lia yang masih berhubungan dengan Aldi yang merupakan pacar Dina. Aldi sebelumnya adalah pacar Lia. Perkelahian ini dipicu karena Aldi masih berhubungan dengan Lia melalui media jejaring sosial *twitter*. Dina merasa cemburu dengan masih berhubungannya Aldi dengan Lia. Dina kemudian menghubungi Lia untuk bertemu di Lapangan Basket Dino di daerah Kecamatan Pahoman pada tanggal 31 Desember 2011. Sesampainya di lapangan basket yang telah dijanjikan sekitar jam 11 malam, keduanya terlibat dalam perkelahian. Dina dan Lia kemudian saling melaporkan ke Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung keesokan harinya dengan laporan Nomor LPB/04/I/2012/LPG tanggal 1 Januari 2012. Setelah Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung memanggil kedua belah pihak baik Dina maupun Lia terjadi kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Kesepakatan perdamaian ini kemudian menjadi pertimbangan kepolisian mengambil langkah diskresi. Penerapan diskresi oleh kepolisian harus didasarkan alasan-alasan dan pertimbangan yang jelas berdasarkan aturan hukum yang berlaku, sehingga hasil dari diskresi tersebut dapat diterima oleh semua pihak.

Sehubungan dengan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul: “Diskresi Polisi Terhadap Tindak Pidana Perkelahian Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi di Polresta Bandar Lampung).”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Sesuai dengan uraian latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah:

- a. Bagaimanakah diskresi kepolisian terhadap tindak pidana perkelahian yang dilakukan oleh anak di Polresta Bandar Lampung?
- b. Apakah faktor-faktor pendukung diskresi kepolisian terhadap tindak pidana perkelahian yang dilakukan oleh anak di Polresta Bandar Lampung?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dari penelitian ini adalah kajian kepustakaan bidang Hukum Pidana pada umumnya dan khususnya mengenai diskresi kepolisian dalam pelaksanaan tugas penyidikan perkara pidana. Penelitian akan dilakukan di Polresta Kota Bandar Lampung pada tahun 2013.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk:

- a. Mengetahui pelaksanaan diskresi kepolisian terhadap tindak pidana perkelahian yang dilakukan oleh anak di Polresta Bandar Lampung.
- b. Mengetahui faktor-faktor pendukung diskresi kepolisian terhadap tindak pidana perkelahian yang dilakukan oleh anak di Polresta Bandar Lampung.

2. Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, kegunaan penelitian skripsi ini adalah:

- a. Secara teoritis, yaitu berguna sebagai sumbangan pemikiran dalam upaya pemahaman wawasan di bidang ilmu hukum pidana, khususnya mengenai diskresi kepolisian terhadap tindak pidana perkelahian.
- b. Kegunaan praktis, yaitu memberikan masukan kepada aparat penegak hukum khususnya kepolisian mengenai penggunaan diskresi kepolisian terhadap tindak pidana perkelahian yang dilakukan oleh anak di Polresta Bandar Lampung.

D. Kerangka Teoretis dan Konseptual

1. Kerangka Teoretis

Kerangka teoretis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk peneliti.⁹

Roescoe Pound, sebagaimana dikutip oleh R. Abdussalam mengartikan diskresi kepolisian yaitu suatu tindakan pihak yang berwenang berdasarkan hukum untuk bertindak pasti atas dasar situasi dan kondisi, menurut pertimbangan dan keputusan nuraninya sendiri.¹⁰ Diskresi merupakan kewenangan kepolisian untuk mengambil keputusan atau memilih berbagai tindakan dalam menyelesaikan

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), Hlm. 125

¹⁰ R. Abdussalam, *Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Restu Agung, 2007), Hlm. 25-26

masalah pelanggaran hukum atau perkara pidana yang ditanganinya. Sekalipun diskresi kepolisian bukan tindakan menyimpang, namun dalam praktek penyelenggaraan tugas-tugas kepolisian, masih banyak aparat kepolisian yang ragu untuk menggunakan wewenang ini, terutama dalam penanganan kasus pidana.

Apabila diperhatikan lebih mendalam, banyak faktor yang menjadi pemicu keengganan aparat kepolisian untuk menerapkan diskresi, khususnya dalam pemeriksaan kasus pidana, diantaranya rendahnya pemahaman aparat kepolisian tentang kewenangan melakukan diskresi, sehingga diskresi dipandang sebagai tindakan manipulasi (illegal), ketakutan akan munculnya penilaian negatif dari masyarakat bahwa penerapan diskresi kepolisian dianggap sebagai akal-akalan pihak kepolisian untuk memperoleh keuntungan materi dari pihak-pihak berperkara.¹¹ Tindakan diskresi yang dilakukan aparat kepolisian dapat dibedakan dalam 2 (dua) kategori yaitu:

- a. Tindakan diskresi yang dilakukan oleh petugas kepolisian secara individu dalam mengambil keputusan, yaitu tindakan diskresi yang diputuskan oleh petugas operasional di lapangan secara langsung pada saat itu juga tanpa meminta petunjuk atau keputusan dari atasannya, seperti petugas kepolisian memberi isyarat untuk terus berjalan kepada pengemudi kendaraan meskipun saat itu lampu pengatur lalu lintas berwarna merah. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya penumpukan arus lalu lintas di suatu ruas jalan;
- b. Tindakan diskresi berdasarkan petunjuk atau keputusan atasan atau pimpinannya. Tindakan untuk mengesampingkan perkara, untuk menahan atau tidak melakukan penahanan terhadap tersangka/pelaku pelanggaran hukum atau menghentikan proses penyidikan, bukanlah tindakan diskresi individual karena pengambilan keputusan diskresi didasarkan atau berpedoman pada kebijakan-kebijakan pimpinan dalam organisasi dan hal tersebut telah menjadi kesepakatan diantara mereka.¹²

¹¹ R. Abdussalam, *Op.cit*, Hlm. 26

¹² Chrysmanda, 2008: <http://elisatris.wordpress.com/penerapan-diskresi-kepolisian-dalam-penegakan-hukum-hukum-pidana/>, diakses tanggal 20 Marer 2013 pukul 11.30 WIB

James Q Wilson mengemukakan ada 4 (empat) tipe situasi tindakan diskresi yang mungkin dilaksanakan, yaitu:

- a. *Police-invoked law enforcement*, dimana petugas cukup luas alasannya untuk melakukan tindakan diskresi, tetapi kemungkinannya dimodifikasi oleh kebijaksanaan pimpinannya;
- b. *Citizen-invoked law enforcement*, diskresi sangat kecil kemungkinan dilaksanakan, karena inisiatornya adalah masyarakat;
- c. *Police-invoked order maintenance*, diskresi dan pengendalian pimpinan seimbang (*intermediate*), apakah pimpinannya akan memerintahkan *take it easy* atau *more vigorous*; dan
- d. *Citizen-invoked order maintenance*, pelaksanaan diskresi perlu dilakukan walau umumnya kurang disetujui oleh atasannya.¹³

Persoalan penting yang dapat menyebabkan rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum pada umumnya khususnya kepolisian adalah adanya kesan seolah-olah kepolisian bertindak diskriminatif dalam melakukan penegakan hukum. Salah satu indikator yang sering dipakai oleh warga masyarakat untuk menilai tindakan diskriminatif aparat penegak hukum adalah tentang perlakuan terhadap warga masyarakat biasa dengan orang-orang yang memiliki kekuasaan yang diduga melakukan tindak kriminal.¹⁴

Selain itu, adanya kewenangan yang demikian besar bagi kepolisian untuk melakukan diskresi juga dapat menjadi bumerang bagi kepolisian untuk tidak dipercaya oleh masyarakat. Situasi ketidakpercayaan itu bisa muncul apabila tidak ada transparansi dan akuntabilitas dari pihak kepolisian itu sendiri. Apalagi apabila kewenangan tersebut dimanfaatkan untuk menutupi kasus-kasus pidana tertentu demi melindungi orang atau kelompok tertentu. Masyarakat juga memiliki hak mengetahui mengapa dalam kasus pidana atau pelanggaran tersebut

¹³ Ibid, http://elisatris.wordpress.com/penerapan-diskresi-kepolisian-dalam_penegakan-hukum-hukum-pidana/, diakses tanggal 20 Maret 2013, pukul 11.30 WIB

¹⁴ <https://krisnaptik.wordpress.com/2013/03/29/membangun-citra-polri-dengan-transparansi-dan-akuntabilitas-polri-dalam-penegakan-hukum/>, diakses tanggal 1 April 2013, pukul 19.30 WIB

dilakukan diskresi dan apabila dirasa perlu masyarakat juga diberikan kesempatan untuk menelusuri kebenaran dari diskresi tersebut.¹⁵

Tidak bisa diingkari bahwa penggunaan kekuasaan secara diskresi seperti itu memiliki kecenderungan yang sangat kuat dan peka dari penilaian-penilaian dan prasangka-prasangka yang negatif terhadap kepolisian, yang disebabkan oleh karena diskresi yang dilakukan oleh kepolisian itu lebih mengandalkan pertimbangan dan keputusan pribadi, maka tak mustahil akan muncul pertanyaan tentang apakah diskresi yang diambil itu tergolong sah atau *legitimate*, atau tergolong diskresi yang tidak adil dan diskriminatif.¹⁶

Satjipto Rahardjo mengingatkan, bahwa oleh karena hukum itu dirumuskan secara umum dan abstrak sementara pemolisian bukanlah pekerjaan yang abstrak, sehingga wajar bila kepolisian kemudian diberi kewenangan untuk membuat penafsiran dan pilihan-pilihan hukum *in optima forma*. Salah satu institusi untuk mewadahi perilaku memilih tersebut adalah kekuasaan untuk melakukan diskresi (*discretionary power*), namun langkah yang ditempuh oleh kepolisian tersebut harus ditunjang oleh adanya transparansi dan akuntabilitas agar tidak menyimpang menjadi sesuatu yang tidak adil atau diskriminatif.¹⁷

Penggunaan diskresi sebagai upaya dari penegakan hukum oleh kepolisian dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut merupakan faktor-faktor

¹⁵ <https://krisnaptik.wordpress.com/2013/03/29/membangun-citra-polri-dengan-transparansi-dan-akuntabilitas-polri-dalam-penegakan-hukum/>, diakses tanggal 1 April 2013, pukul 19.30 WIB

¹⁶ Erlын Indarti, *Diskresi Polisi*. (Semarang: Lembaga Penerbit Undip, 2000), Hlm. 61

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Pertanggungjawaban Polisi Berkaitan dengan Tugasnya: Penjelajahan terhadap Peta Permasalahan*, (Makalah Seminar Nasional Polisi Indonesia II, diselenggarakan oleh Pusat Studi Kepolisian Fakultas Hukum Undip, 15 Juli 1995), Hlm. 9-10, dikutip dari <https://krisnaptik.wordpress.com/2013/03/29/membangun-citra-polri-dengan-transparansi-dan-akuntabilitas-polri-dalam-penegakan-hukum/>, diakses tanggal 1 April 2013

yang secara umum mempengaruhi penegakan hukum. Beberapa faktor yang dapat mendukung berjalannya proses penegakan adalah sebagai berikut:

- a. Faktor hukumnya sendiri, yaitu peraturan perundang-undangan yang menjamin pelaksanaan suatu aturan hukum;
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membuat atau membentuk maupun yang menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni faktor lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹⁸

2. Konseptual

Menurut Soerjono Soekanto¹⁹, kerangka konseptual adalah suatu kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti, baik dalam penelitian normatif maupun empiris.

Hal ini dilakukan dan dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam melakukan penelitian, maka di sini akan dijelaskan tentang pengertian pokok yang dijadikan konsep dalam penelitian, sehingga akan memberikan batasan yang tetap dalam penafsiran terhadap beberapa istilah. Istilah-istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Tindakan adalah sesuatu yang dilakukan atau perbuatan.²⁰
- b. Diskresi adalah suatu tindakan pihak yang berwenang berdasarkan hukum untuk bertindak pasti atas dasar situasi dan kondisi, menurut pertimbangan dan keputusan nuraninya sendiri. Diskresi merupakan kewenangan kepolisian

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada: 2007), Hlm. 5

¹⁹ Soerjono Soekanto. *Op. cit.* 1986. Hlm. 124

²⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), Hlm. 937

untuk mengambil keputusan atau memilih berbagai tindakan dalam menyelesaikan masalah pelanggaran hukum atau perkara pidana yang ditanganinya.²¹

- c. Tindak Pidana Tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan merupakan perbuatan yang anti sosial.²²
- d. Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.²³

E. Sistematika Penulisan

Sistematika mempermudah dan memahami penulisan ini secara keseluruhan, maka penulisan ini dibagi menjadi 5 (lima) bab dengan sistematika sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang permasalahan, ruang lingkup dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoretis dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tentang pengertian-pengertian dari istilah sebagai latar belakang pembuktian masalah dan dasar hukum dalam membahas hasil penelitian yang terdiri dari: penerapan diskresi kepolisian, tindak pidana penganiayaan, tinjauan

²¹ R. Abdussalam, *Op.cit*, Hlm. 26

²² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Bina Aksara, 1993), Hlm. 9.

²³ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

tentang anak dan pemidanaan terhadap anak, konsep diversi terhadap anak dalam Undang-Undang 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, dan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode yang akan digunakan dalam penelitian berupa langkah-langkah yang akan digunakan dalam melakukan pendekatan masalah, penguraian tentang sumber data dan jenis data, serta prosedur analisis data yang telah didapat.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat pokok bahasan mengenai hasil penelitian, yang terdiri dari karakteristik responden, diskresi kepolisian terhadap tindak pidana perkelahian yang dilakukan oleh anak di Polresta Bandar Lampung dan faktor-faktor pendukung diskresi kepolisian terhadap tindak pidana perkelahian yang dilakukan oleh anak di Polresta Bandar Lampung.

V. PENUTUP

Merupakan bab penutup dari penulisan skripsi yang secara singkat berisikan hasil pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan dan kesimpulan serta saran-saran yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas bagi aparat penegak hukum terkait.